***PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP* DALAM PEMBERDAYAAN LANJUT USIA
(LANSIA) MELALUI USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)
DI KOTA MAKASSAR**

SRI WAHYUNI

105641112816

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

**PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP DALAM PEMBERDAYAAN LANJUT
USIA (LANSIA) MELALUI USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)**

DI KOTA MAKASSAR

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

SRI WAHYUNI

105641112816

Kepada :

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERITAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

18/03/2021

1 eq
Sub-Alumni

R/0024/IPM/21CP

WAH

P¹

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : *Public Private Partnership* dalam Pemberdayaan Lanjut Usia (lansia) melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar.

Nama Mahasiswa : Sri Wahyuni
Nomor Stambuk : 105641112816
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Sri Wahyuni
Nomor Stambuk : 105641112816
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 23 Februari 2021

Yang Menyatakan,

Sri Wahyuni

ABSTRAK

Sri Wahyuni, 2020. *Public Private Partnership* dalam Pemberdayaan Lanjut Usia (lansia) melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Di Kota Makassar. (Dibimbing oleh Fatmawati dan Nuryanti Mustari).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Model Public Private Partnership dalam Pemberdayaan Lanjut Usia (lansia) melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar. Menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Sumber data, yaitu primer dan sekunder, jumlah informan 6 (enam) orang. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi. Analisis data meliputi Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data meliputi Triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kemitraan mutualistik merupakan model kemitraan yang digunakan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda dalam pemberdayaan lanjut usia (lansia) melalui usaha ekonomi produktif (UEP) di Kota Makassar. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan sebagai mitra yang mendanai dan membangun fasilitas program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar kemudian Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKLSU) Tunas Muda yang mengoperasikan dan menjalankan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Faktor pendukung dalam model kemitraan mutualistik yaitu adanya keterlibatan aktif dari anggota keluarga serta pendamping Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk keberhasilan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sedangkan Faktor penghambat model kemitraan mutualistik yaitu karna adanya data yang tidak valid, masih banyak lanjut usia yang ID BDT (basis data terpadu) belum terdaftar. sedangkan ID BDT (basis data terpadu) merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar.

Kata Kunci: Public Private Partnership, Pemberdayaan, Lanjut Usia (lansia) Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya yang tak terhingga dan nikmatnya yang tak berujung sehingga kita mampu melewati hari-hari yang penuh makna, dan memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Public Private Partnership dalam Pemberdayaan Lanjut usia (Lansia) melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar”.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan dari program studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa untuk menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini tidaklah mudah. Namun penulis menyadari bahwa begitu banyak pihak yang membantu saya dalam menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini dan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat.

L. Ibu Dr. Hj. Fatmawati, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si dan bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.Hi selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos., M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Segenap Dosen serta staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu dan pelayanan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Kepada kedua orang tua tercinta yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat, memberikan pendidikan sampai pada jenjang saat ini, mendoakan memberi semangat dan motivasi serta bantuan baik dari moral ataupun materi dan tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Pihak Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi terkait penelitian ini.
7. Pihak Lanjut Usia (lansia) yang telah membantu dan mendukung penelitian ini.

8. Sahabat Lambe Girls yang selalu membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi.
9. Keluarga dan saudara penulis yang telah memberikan support dalam penulisan skripsi.
10. Saudara dari awal masuk Universitas sampai sekarang IP.C.

Teriring doa semoga Allah SWT menjadikan pengorbanan dan kebaikan itu sebagai cahaya penerang di dunia maupun di akhirat kelak. Akhir kata penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca untuk menambah ilmu Pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan.

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar, 23 Februari 2021

Penulis

SRIWAHYUNI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Masalah.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Konsep Public Private Partnership.....	11
C. Konsep Pemberdayaan.....	15
D. Konsep Lanjut Usia.....	18
E. Usaha Ekonomi Produktif (UEP).....	20
F. Kerangka Pikir.....	21
G. Fokus Penelitian.....	22
H. Deskripsi Fokus Penelitian.....	22
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	23
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	23
C. Sumber Data.....	24
D. Informan Penelitian.....	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Teknik Analisis Data.....	27
G. Keabsahan Data.....	28
BAB IV. PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	31
B. Data Penerima Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar.....	42
C. Public Private Partnership dalam Pemberdayaan Lanjut Usia (lansia) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar.....	44
1. Model kemitraan mutualistik.....	44
D. Faktor yang mempengaruhi Public Private Partnership dalam Pemberdayaan Lanjut Usia (lansia) melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP).....	54
1. Faktor Pendukung.....	54
2. Faktor Penghambat.....	57

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informan Penelitian	26
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Makassar.....	33
Tabel 3. Luas Wilayah Kota Makassar.....	34
Tabel 4. Data Penerima Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penuaan penduduk telah berlangsung secara pesat, terutama di Indonesia. Saat ini penduduk lanjut usia di Indonesia telah mengalami peningkatan dari sebelumnya, berdasarkan data survey sosial ekonomi nasional (Susenas) Tahun 2018 jumlah lansia adalah 24,49 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk Negara memasuki era penduduk menua (*ageing population*) karena jumlah penduduk yang berusia 60 tahun ke atas sudah mencapai angka 9,27%. Berdasarkan penetapan basis data terpadu (BDT) tahun 2018, lanjut usia miskin dalam rumah tangga 14,1 juta jiwa. Data tersebut menunjukkan situasi dimana lanjut usia yang mengalami kemiskinan masih sangat tinggi, khususnya di Kota Makassar banyak permasalahan yang dialami oleh lanjut usia.

Kemitraan sebagai kerja bersama (*working together*) dikemukakan oleh Hodget & Johnson (2001) bahwa kemitraan diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diinginkan individu, kelompok, lembaga atau organisasi untuk menghasilkan suatu keluaran yang bermakna dan berkelanjutan. Dengan menggunakan Kemitraan dalam pemberdayaan lanjut usia (lansia) melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan swasta merupakan faktor yang penting untuk diteliti karena kemitraan merupakan suatu upaya untuk mewujudkan kedekatan antara unsur pemerintah, swasta dan masyarakat melalui peran masing-masing yang

seimbang. Pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat yang terjadi selama ini adalah lebih pada pemberdayaan masyarakat lokal, walaupun terjadi beberapa pergeseran sesuai didukung pemerintah dengan membantu pembangunan lanjutan hingga menjadi lebih sempurna.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 Pasal 6 Ayat 1 menetapkan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) mempunyai fungsi sebagai mitra pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan kini telah melaksanakan yang dimana telah bermitra dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda dalam pemberdayaan lanjut usia (lansia) melalui usaha ekonomi produktif (UEP) khususnya di Kota Makassar untuk menyelesaikan persoalan yang di alami oleh lanjut usia. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan program Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat, sedangkan tanggung jawab memberdayakan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU).

Sejauh ini kepedulian pemerintah telah diwujudkan dengan berbagai kebijakan dan program untuk membantu dalam meningkatkan kesejahteraan bagi lansia. Sebagai salah satu sikap kepedulian terhadap lansia, maka perlu

menciptakan adanya kondisi, dan suasana nyaman baik itu di lingkungan keluarga, maupun masyarakat. Menciptakan kondisi yang sedemikian rupa sehingga seseorang yang berusia lanjut merasa dirinya berguna, berprestasi, sehingga menimbulkan rasa senang dan rasa puas adalah perilaku bijak sebagai ungkapan kepedulian terhadap lansia .

Pemberdayaan lansia memang sangat diperlukan, dimana lansia merupakan salah satu kelompok lemah yang harus tetap diberdayakan dengan berbagai potensi yang dimiliki. Pemberdayaan lansia merupakan setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para lansia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam hal ini pemberdayaan lansia dapat dilakukan melalui lingkup masyarakat, maupun dari lingkungan keluarga secara langsung.

Dinas Sosial Provinsi Sul-Sel bekerja sama dengan lembaga kesejahteraan lanjut usia Tunas Muda membentuk kelompok kegiatan melalui program usaha ekonomi produktif (UEP) yang dimana lansia bisa lebih produktif yang masih mampu membuat kerajinan sesuai dengan kemampuannya sendiri dengan begitu lansia tidak lagi membebani masyarakat lain dan bergantung ke keluarga dan pemerintah.

Usaha mengupayakan pemberdayaan lansia melalui adanya kegiatan usaha ekonomi produktif yang bisa dikembangkan oleh lansia. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan hidup bagi lansia. Mengingat lansia yang masih mempunyai motivasi yang tinggi

terlebih dalam hal memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kegiatan usaha ekonomi produktif ini dilakukan sebagai salah satu kegiatan yang digunakan untuk mengisi waktu luang dan dipadukan dengan kegiatan rekreatif yang mampu mendukung dalam memperoleh penghasilan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 38 ayat 1 menetapkan bahwa upaya pemeliharaan bagi lanjut usia (lansia) harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomi sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal 2 menetapkan pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis.

Pemberdayaan bertujuan untuk membuat seseorang/kelompok/ masyarakat menjadi lebih berdaya, yakni mampu hidup tanpa harus bergantung dengan pihak tertentu. Pemberdayaan lansia melalui usaha ekonomi produktif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bagi lansia sehingga lansia tidak dipandang sebagai beban dalam masyarakat.

Di kota Makassar masih banyaknya lansia yang terlantar dan masih banyak yang dijadikan sebagai beban dari keluarganya sendiri. Sehingga upaya yang dapat dilakukan dengan memberdayakan lansia untuk ikut aktif berpartisipasi dalam pembangunan guna mengurangi kemiskinan, memperoleh kesehatan yang lebih baik dan mendukung kehidupan sosial kemasyarakatan

melalui pemberdayaan Lansia yang tetap memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya. Olehnya karna itu peneliti mengangkat judul “*Public Private Partnership* dalam Pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Model Kemitraan *Public Private Partnership* dalam Meningkatkan Pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat *Public Private Partnership* dalam Pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui gambaran tentang model kemitraan *Public Private Partnership* dalam Meningkatkan Pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat *Public Private Partnership* dalam Pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar.

D. Manfaat penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta berguna terutama:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan teori keilmuan, khususnya dibidang ilmu kesejahteraan sosial dan ilmu sosial lainnya. Memberikan tambahan pemahaman tentang pemberdayaan terutama dalam hal pemberdayaan lansia. Sehingga ilmu pengetahuan tentang pemberdayaan menjadi luas cakupannya.
2. Secara praktis, memberikan kontribusi yang positif bagi para insan akademik dan menambah pengetahuan bagi masyarakat luas pada umumnya, khususnya dalam hal ini kepada para keluarga lansia atau lembaga yang peduli pada lansia, mengenai pentingnya kesejahteraan dan pemberdayaan lansia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

No	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ine Mariane, Soleh Suryadi, Taqwy Firdausjani, Rizki Ilhami (2020)	Peningkatan Pariwisata Melalui Public Private Partnership Di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung	Tujuan dari pengabdian pada masyarakat ini adalah untuk mendidik pelaku usaha terkait dengan potensi agrowisata yang ada dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun kemitraan melalui kemitraan masyarakat, pemerintah, dan dunia industri/usaha yang diperlukan untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada. Hasil pengabdian pada masyarakat di desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung adalah membangun kemitraan masyarakat, pemerintah, dan dunia industri/usaha sehingga membentuk MOU juga mendapatkan kemampuan mengelola pariwisata di desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Dampak dari pengabdian pada masyarakat yaitu membantu karang taruna sebagai pelaku usaha pariwisata dan aparat desa

			dalam mengembangkan potensi yang ada melalui kemitraan masyarakat, pemerintah, dan dunia industri/usaha yang ada sehingga terbentuk MOU.
2.	Budi Hasanah, Annisarizki, Sigit Surahman (2019)	Pemberdayaan Dan Pendampingan Pengembangan Desa Wisata Sukaratu Kabupaten Serang Berbasis Public Private Partnership	<p>Dalam pengembangannya desa wisata ini butuh adanya kerjasama dengan berbagai pihak berbasis <i>public private partnership</i> (warga masyarakat setempat pemerintah serta pihak swasta) agar dapat mengeksplor potensi yang ada dengan baik. Tujuan pengabdian ini memberikan materi dan pendampingan bagi warga beserta pokdarwis (kelompok sadar wisata) dan aparat Desa Sukaratu. Dalam mengembangkan potensi desa wisata melalui kegiatan pemberdayaan dan pendampingan berbasis <i>public private partnership</i>. Metode kegiatan yang dipakai menggunakan <i>participatory learning and action</i>. Kesimpulan dari kegiatan ini terlihat warga beserta pokdarwis dan aparat Desa Sukaratu dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Indikator keberhasilan dengan tingkat keberhasilan 75% (sangat baik) meskipun masih perlu dilakukan pendampingan oleh fasilitator. Rekomendasi dalam kegiatan ini adalah perlu ditambahkan mitra baik dari pihak pemerintah atau swasta dan terjalin kerjasama yang kuat dalam pengembangan desa wisata sukaratu</p>

			sehingga <i>outcome</i> yang diterima kembali lagi untuk kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat lokal Desa Sukaratu.
3.	Asidigisianti Surya Patria, Siti Mutmainah	Model Pemberdayaan Kelompok Lanjut Usia Wanita Melalui Industri Kreatif	Karang Werda Wiguna Karya Kelurahan Kebonsari Surabaya merupakan sekelompok masyarakat yang kurang produktif. Persoalan prioritas yang disepakati untuk diselesaikan selama pelaksanaan kegiatan dalam memberdayakan para lansia berpotensi untuk mempelajari keterampilan kerajinan Makrame. Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif untuk memudahkan dalam mendeskripsikan beberapa fakta-fakta, dan hasil yang terdapat di kelompok lansia. Subyek penelitian ini adalah Karang Werda Wiguna Karya Kelurahan Kebonsari Surabaya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, penelusuran data online, observasi, wawancara mendalam (<i>indepth interview</i>) dengan informan dan dokumentasi yang dilakukan melalui studi lapangan (<i>field research</i>). Luaran (<i>output</i>) dari kegiatan pemberdayaan ini adalah produk-produk kerajinan berbahan tali kor dengan teknik makrame, yaitu: sarung bantal kursi, tutup galon air mineral, kap lampu dan tas. Media promosi berupa standing banner dan brosur digunakan untuk memasarkan produk-produk

			kerajinan ketika mengikuti pameran produk unggulan daerah.
--	--	--	--

Dari uraian tabel di atas dapat kita lihat bahwa pada penelitian terdahulu terdapat beberapa persamaan, diantaranya penelitiannya sama-sama penelitian kualitatif dan pembahasannya terkait Public Private Partnership dan pemberdayaan yang memberikan dampak kepada masyarakat dalam pengelolaan sumber daya manusia dan alam, melalui partnership serta bantuan berdasarkan kesepakatan MOU. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini terkait dengan pemberdayaan lanjut usia melalui usaha ekonomi produktif. Hal ini dimaksudkan agar mengetahui model kerjasama antara pemerintah dan swasta sehingga memberikan informasi serta pengetahuan kepada masyarakat terkait manfaat partnership agar dapat di implementasikan di sektor lain dan tentunya memberikan manfaat kepada masyarakat dan lansia.

B. Konsep Public Private Partnership

1. Teori *Public Private Partnership*

Menurut Amirullah dalam (Irianti, 2011) *Public Private Partnership* adalah kerjasama pemberian sebagian kewenangan pemerintah kepada sektor swasta untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan pembangunan dan atau pengoperasian infrastruktur. Pengertian *Public Private Partnership* (PPP) menurut *United Kingdom Foreign & Commonwealth Office* (2013) merupakan perjanjian kontrak antara sebuah badan politik dan sebuah entitas swasta, yang mana akan dibagi asset dan kemampuan dari tiap pihak dalam mengoperasikan sebuah fasilitas atau jasa, dalam periode waktu yang cukup panjang, yaitu 20-30 tahun atau lebih.

David Levinson (2006) mengatakan bahwa *Public Private Partnership* yang sukses adalah yang dapat meningkatkan kualitas. Faktor-faktor tersebut, sekaligus dijadikan nilai positif atau keuntungan, dari *Public Private Partnerships*. Di sebagian besar negara berkembang kerjasama PPP ini belum banyak dilakukan karena umumnya di negara berkembang, pemerintah sebagai organisasi publik memiliki kemampuan untuk mengurus dan melayani kepentingan masyarakat dibanding organisasi lain atau swasta. Di negara maju kemitraan antara pemerintah dan swasta sudah banyak dilakukan bahkan urusan pemerintah ditangani oleh pihak swasta, pemerintah hanya mengarahkan (steering) melalui pembuatan peraturan-peraturan dan pengawasan.

Menurut Masturi (2016) , Kemitraan adalah hubungan kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut mahluk sosial. Kemitraan dalam pelayanan public bahwa kemitraan diarahkan untuk mencapai tujuan diinginkan individu, kelompok, lembaga atau organisasi untuk Yaitu, : (1) adanya persamaan dan organisasi yang lebih pandai. (2) mempunyai hierarki aktualisasi yang luwes (3) spiritualitas yang berbasis alamiah. (4) tingkat kekacauan yang rendah yang terbentuk dalam sistem. Dan (5) persamaan dan keadilan gender. (Fatmawati, 2011)

Kemitraan mengacu kepada dukungan sukarela dan resiprokal (timbal balik) antara dua atau lebih badan sektor publik yang berbeda. Dengan kata lain antar administrasi publik dengan privat, termasuk organisasi nonprofit. Berbagai sektor tersebut saling memberikan dukungan satu sama lain dalam rangka pelayanan publik yang menjadi bagian dari misi pemerintah. Pengertian kemitraan sebagai kerja bersama (working together) dikemukakan oleh Hodget & Johson (2001) bahwa kemitraan diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diinginkan individu, kelompok, lembaga atau organisasi untuk menghasilkan suatu keluaran yang bermakna dan berkelanjutan.

2. Pola Kemitraan (Partnership)

Menurut Busmiati (2017) telah mendeskripsikan pola kemitraan agar bagaimana dapat mencapai hasil kemitraan yang di inginkan yaitu.

1. Pola tersebut terjadi apa bila perusahaan masih mengutamakan kepentingan shareholders dengan mengejar profit sebanyakbanyaknya. Sehingga perusahaan dapat meraup keuntungan secara maksimal, sementara hubungan dengan pemerintah dan kelompok masyarakat hanya pemanis belaka. Dimana perusahaan hanya berjalan sesuai dengan targetnya sendiri yang ingin dicapai, sedangkan pemerintah juga tidak mau ambil peduli dan tidak adanya pengawasan yang efektif sehingga masyarakat tidak punya akses apapun kepada perusahaan. Biasanya, perusahaan mengeluarkan biaya hanyalah digunakan untuk kepentingan orang-orang tertentu saja. Hal ini dapat dipahami, bahwa bagi perusahaan yang penting adalah keamanan jangka pendek saja. Di dalam konsep seperti ini, terkesan menggambarkan sebuah negatif.
2. Pola kemitraan semi produktif, Di dalam konsep ini sebuah perusahaan tidak mengetahui program-program pemerintah, yang dimana tidak adanya komunikasi antara pemerintah dan pengusaha dalam semua pembangunan dalam dunia usaha dan masyarakat hanya memposisikan dirinya yang bersifat pasif. Sehingga pemerintah dan komunitas masyarakat dianggap sebagai obyek dan masalah di luar perusahaan. Pola kemitraan seperti ini masih mengedepankan pada kepentingan jangka pendek. Dengan kata

lain, kemitraan belum strategis dan masih mengedepankan kepentingan sendiri bukan kepentingan bersama antara perusahaan dengan mitranya.

3. Pola kemitraan produktif, Pola kemitraan ini menjadikan mitra sebagai subyek dalam menghasilkan sebuah pembangunan yang efektif. Pada pola ini dimana sebuah perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, sehingga pemerintah memberikan fasilitator yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat sangat antusias dan mendukung positif kepada perusahaan. Sehingga menghasilkan kepercayaan yang semakin tinggi antara satu sama lain, sehingga menghasilkan hubungan yang sinergis antara subyek-subyek dalam bermitra.

3. Model Kemitraan (Partnership)

Model-model kemitraan dikembangkan berdasarkan pengamatan yang dilakukan dalam hubungan kerjasama antar organisasi. Menurut Sulistiyani (2004:130) terdapat 3 model kemitraan yang mampu menggambarkan hubungan antar organisasi, yakni :

1. Kemitraan semu

Kemitraan semu adalah merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan yang lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa

kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

2. Kemitraan mutualistik

Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara optimal.

3. Kemitraan konjugasi (peleburan dan pengembangan)

Kemitraan konjugasi (peleburan dan pengembangan) adalah kemitraan untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

B. Konsep Pemberdayaan

1. Teori Pemberdayaan

Menurut Eddy Papilaya dalam (Zubaedi) Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Pemberdayaan di sini

mengandung arti bahwa lansia bukan sebagai obyek, tetapi subyek yang dapat diangkat dan diberdayakan potensinya, sehingga mereka dapat hidup mandiri tanpa merepotkan dan mengganggu orang lain.

Zubaedi Ginandjar Kartasasmitha menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan di sini mengandung arti bahwa lansia bukan sebagai obyek, tetapi subyek yang dapat diangkat dan diberdayakan potensinya, sehingga mereka dapat hidup mandiri tanpa merepotkan dan mengganggu orang lain. Pemberdayaan mengandung makna sebagai reaksi balik atas fenomena ketidakberdayaan menghadapi sebuah kekuasaan besar yang telah menjadi sebuah wacana (Sachari, 2007).

Menurut Esrom Aritonang Pemberdayaan yaitu sebagai usaha untuk mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya) potensi, sumberdaya masyarakat agar membela dirinya. Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada tingkat individu dan sosial. Sebagai proses pemberdayaan dalam memberdayakan para lansia, maka program-program dalam pemberdayaan lansia sebagai tujuan untuk mencapai perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas dalam kehidupan. Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan

dalam rangka meningkatkan kemampuan warga untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

2. Tahapan Pemberdayaan

Menurut Isbandi Rukminto Adi dalam Azis Muslim (2012), tahapan pemberdayaan terdiri dari 7 (tujuh) langkah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, yaitu penyiapan petugas dan penyiapan lapangan. Penyiapan petugas dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara anggota tim fasilitator mengenai pendekatan yang akan dipilih. Sedangkan penyiapan lapangan dimaksudkan untuk melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan.
2. Tahap assessment. Tahap ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat sasaran pemberdayaan.
3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahap ini fasilitator secara partisipatif mencoba melibatkan masyarakat untuk berpikir tentang masalah yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
4. Tahap formulasi rencana aksi. Pada tahap ini fasilitator membantu masing-masing masyarakat sasaran pemberdayaan untuk memformulasikan

gagasan mereka terutama dalam bentuk tulisan bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal yang akan ditunjukkan kepada penyalang dana.

5. Tahap pelaksanaan. Pada tahap ini masyarakat mengimplementasikan agar apa yang telah dirumuskan bersama-sama. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan memerlukan adanya peran dari masyarakat, dan fasilitator. Perlu menjalin kerjasama yang baik antara fasilitator dengan masyarakat karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik bisa melenceng saat di lapangan.
6. Tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini dilakukan sebagai proses pengawasan dari masyarakat dan fasilitator terhadap program pemberdayaan yang telah dilaksanakan. Evaluasi sebaiknya dilakukan dengan melibatkan masyarakat bersama-sama dengan fasilitator.
7. Tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Terminasi seharusnya dilakukan jika masyarakat sasaran sudah bisa mandiri, bukan dilakukan karena penyalang dana telah menghentikan bantuannya.

C. Konsep Lansia

1. Lansia

Lansia adalah manusia yang mulai menjadi tua secara alamiah akan mengalami berbagai perubahan, baik yang menyangkut kondisi fisik maupun mentalnya. Terdapat tiga aspek yang perlu dipertimbangkan untuk membuat suatu batasan penduduk lanjut usia menurut Badan Koordinasi Keluarga

Berencana Nasional (BKKBN) yaitu aspek biologi, aspek ekonomi dan aspek sosial. Secara biologis penduduk lanjut usia adalah penduduk yang mengalami proses penuaan secara terus menerus, yakni ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik yaitu semakin rentannya terhadap serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ. Jika ditinjau secara ekonomi, penduduk lanjut usia lebih dipandang sebagai beban dari pada sebagai sumberdaya. Banyak orang beranggapan bahwa kehidupan masa tua tidak lagi memberikan banyak manfaat, bahkan ada yang sampai beranggapan bahwa kehidupan masa tua, seringkali dipersepsikan secara negatif sebagai beban keluarga dan masyarakat (BKKBN, 2011).

2. Ciri-Ciri Lansia

Hurlock (2012) menjelaskan secara lebih khusus bahwa masa lansia memiliki ciri-ciri:

- 1) Terjadinya berbagai macam kemunduran (fisik dan mental)
- 2) Terjadi perbedaan individual pada efek menua
- 3) Usia lanjut dinilai dengan kriteria yang berbeda
- 4) Munculnya berbagai stereotipe yang diberikan pada lansia (seringnya bersifat negatif)
- 5) Sikap sosial terhadap lansia yang sering tidak menyenangkan

- 6) Lansia mempunyai status kelompok yang minoritas
- 7) Belajar menerima perubahan peran sebagai lansia
- 8) Lansia sering memiliki penyesuaian diri yang buruk akibat dari sikap sosial yang tidak menyenangkan, dan
- 9) Memiliki keinginan untuk kembali muda

D. Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Usaha ekonomi produktif, terdiri dari kata usaha, ekonomi, dan produktif, bahwa yang dimaksud dengan usaha adalah daya, ikhtiar atau upaya. Sedangkan ekonomi adalah segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (keuangan). Selanjutnya pengertian produktif adalah sifatnya banyak menghasilkan. Jadi yang dimaksud usaha ekonomi produktif dalam proposal ini adalah daya, ikhtiar, atau upaya yang dilakukan oleh lansia yang banyak menghasilkan barang dan jasa untuk mendukung dalam perolehan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan adanya usaha ekonomi produktif ini lansia tetap bisa melakukan kegiatan usaha yang mampu menghasilkan pendapatan dan mendukung dalam kesejahteraan hidupnya. Mengisi waktu luang dengan usaha sekaligus menjadi kegiatan rekreatif bagi lansia.

E. Kerangka Pikir

Dari beberapa teori yang digunakan penulis dalam *Public Private Partnership* dalam Pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Di Kota Makassar maka di bangun kerangka pikir sesuai dengan teori model kemitraan mutualistik (Sulistiyani, 2004) untuk mengukur peningkatan pemberdayaan lanjut usia melalui usaha ekonomi produktif di kota Makassar , yang di gambarkan dalam tabel sebagai berikut :

F. Fokus Penelitian

Berdasarkan bagan kerangka pikir terkait dengan *Public Private Partnership* dalam Pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Di Kota Makassar. Maka yang menjadi fokus penelitian yaitu: Model kemitraan semu, model kemitraan mutualistik, model kemitraan konjugasi, faktor pendukung dan faktor penghambat dalam peningkatan pemberdayaan lanjut usia di kota Makassar.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian maka yang menjadi deskripsi dalam focus penelitian tersebut adalah:

- a) Model Kemitraan Semu merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan yang lainnya. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama dalam pemberdayaan masyarakat lanjut usia (lansia) di Kota Makassar.
- b) Model Kemitraan Mutualistik merupakan persekutuan antara Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda yang sama-sama menyadari aspek penting nya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan

mendapatkan manfaat sehingga akan dapat mencapai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat lanjut usia (lansia) .

- c) Model Kemitraan konjugasi adalah kerjasama antara Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKLSU) Tunas Muda untuk memberdayakan lanjut usia (lansia) agar masyarakat yang sudah lanjut usia mendapatkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda agar lanjut usia (lansia) bisa hidup lebih mandiri dan tidak bergantung pada orang lain.
- d) Faktor pendukung adalah kesetruhan mekanisme kegiatan dalam meningkatkan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
- e) Faktor penghambat adalah proses yang melatar belakangi keterhambatan dalam meningkatkan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian ini dilakukan pada bulan September-November. Lokasi penelitian bertempat di Kota Makassar terkhusus di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Tunas Muda. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui bagaimana model *Public Private Partnership* dalam Pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian *Public Private Partnership* dalam Pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif dilapangan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan Sugiyono (2012). Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang *Public Private Partnership* dalam Pemberdayaan Lanjut Usia

(Lansia) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar. Untuk itu peneliti harus terjun ke lapangan dalam waktu yang cukup lama.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif karena terkait langsung dengan gejala-gejala yang muncul disekitar penelitian dan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dengan masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini untuk membuat deskripsi, atau gambaran secara sistematis serta berhubungan antara fenomena yang di teliti.

3. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif karena terkait langsung dengan gejala-gejala yang muncul disekitar penelitian dan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dengan masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini untuk membuat deskripsi, atau gambaran secara sistematis serta berhubungan antara fenomena yang di teliti.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di jaring dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian ini .

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan penelitian ini dipilih dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan penelitian. Dimana informan ini diharapkan memberikan data secara obyektif, netral dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun informan dari penelitian ini berdasarkan *Public Private Partnership* dalam Pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar.

Tabel 1. Informan

NO	NAMA	INISIAL	JABATAN	KETERANGAN
1	Muhammad Bakri, S.Sos, MM	MB	Kepala Seksi Rehsos Penyangg Disabilitas dan Rehsos Lansia	1 Orang
2	Aco Iskandar	AI	Ketua Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia Tunas Muda	1 Orang
3	Marni G	MG	Pendamping lanjut usia LKSLU Tunas Muda	1 Orang
4	Saenab	SN	Penerima Program	1 Orang
5	Cakka Hayati	CH	Penerima Program	1 Orang
6	Dewi Sulastri	DS	Keluarga Penerima Program	1 Orang
Total Informan				6 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung yang berkaitan dengan *Public Private Partnership* dalam Pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan informan sesuai dengan jenis data dan

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan informan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi data yang di peroleh melalui laporan, artikel, dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh (Lexy). Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen yaitu Reduksi data (*data reduction*), Penyajian data (*data display*), Penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*) (Pawito; 2007).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap *pertama*, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data. Pada tahap *kedua*, peneliti menyusun kode-kode dan catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta proses-proses

sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Komponen kedua yakni penyajian data (*data display*) melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan teras bertumpuk, maka penyajian data (*data display*) pada umumnya sangat diyakini sangat membantu proses analisis

3. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Pada komponen terakhir, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan (*drawing dan verifying conclusions*), peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat.

G. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2014), Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu yakni sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada, kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan

wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Trigulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kota Makassar

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara $119^{\circ}24'17''38''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}8'6''19''$ Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan $0-2^{\circ}$ (datar) dan kemiringan lahan $3-15^{\circ}$ (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat $175,77$ km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara $26,^{\circ}\text{C}$ sampai dengan 29°C .

Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai "Waterfront City" yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara $0-25$ meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering mengalami

genangan air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang.

Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya. Adapun jumlah penduduk Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Makassar

No	Kecamatan	2019		Jumlah
		Jumlah penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Mariso	30.609	29.890	60.499
2.	Mamajang	30.129	31.323	61.452
3.	Tamalate	102.128	103.413	205.541
4.	Rappocini	82.162	87.959	170.121
5.	Makassar	42.553	42.962	85.515
6.	Ujung pandang	15.716	15.338	29.054
7.	Wajo	15.470	15.983	31.453
8.	Bontoala	27.886	29.311	57.191
9.	Ujung tanah	18.037	17.947	35.984
10.	Sangkarang	7.239	7.292	14.531
11.	Tallo	70.303	70.027	140.330
12.	Panakukang	73.971	75.693	149.664
13.	Manggala	75.094	74.393	149.487
14.	Biringkanaya	110.138	110.318	220.456
15.	Tamalanrea	56.533	59.310	115.843
	JUMLAH	755.968	770.709	1.526.677

Sumber: Badan Pusat Statistik kota Makassar.

Penduduk Kota Makassar berdasarkan proyeksi tahun 2019 sebanyak 1.526.667 jiwa yang terdiri atas 755.968 jiwa penduduk laki-laki dan 770.709 jiwa penduduk perempuan.

Kondisi geografis Kota Makassar yang berada di tengah wilayah Kepulauan Nusantara menjadikan kota ini sebagai pusat perlintasan dari wilayah Barat ke wilayah Timur bahkan dari wilayah Utara ke wilayah Selatan Indonesia. Adapun Luas Wilayah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Luas Wilayah Kota Makassar.

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)
		2015
1.	Rappocini	9.23
2.	Makassar	2.52
3.	Mariso	1.82
4.	Mamajang	2.25
5.	Tamalate	20.21
6.	Ujung Pandang	2.63
7.	Wajo	1.99
8.	Bontoala	2.10
9.	Ujung Tanah	5.94
10.	Sangkarang	5.83
11.	Tallo	17.05
12.	Panakukang	24.14
13.	Manggala	48.22
14.	Biringkanaya	31.84
15.	Tamalanrea	175.77
	Jumlah	350.54

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar.

Berdasarkan dari tabel di atas luas wilayah kota Makassar yaitu 350,54 km² dari 15 Kecamatan dimana kecamatan Rappocini dengan luas 9,23 km², dan Kecamatan Mariso 1,82 km² dan Kecamatan Makassar 2,52, km² Kecamatan Mamajang 2,52 km², Kecamatan Tamalate 20,21 km², Kecamatan Ujung Pandang 2,63km², Kecamatan Wajo 1,99 km² Kecamatan Bontoala 2,10 km² dan Kecamatan Ujung Tanah 5,94 km²,Kecamatan Sangkarang 5,83 km² Kecamatan Tallo 17,05 km² Kecamatan Panakukkang 24,14km², Kecamatan Manggala 48,22km² kecamatan Biringkanaya 31,84 km² dan Tamalanrea 175,77km².

2. Gambaran Khusus lokasi Penelitian

Secara khusus lokasi penelitian ini berada di Jalan Andi Tadde No.1 Kelurahan Timungan Lompoa Kec. Bontoala, tepatnya di depan SMP Negeri 10 Makassar. Kecamatan Bontoala merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kota Makassar yang berbatasan dengan Kecamatan Ujung Tanah di sebelah utara, Kecamatan Tallo di Sebelah Timur, Kecamatan Makassar di sebelah selatan dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ujung Pandang. Kecamatan Bontoala memiliki Luas Wilayah 2,10Km² terdiri dari 12 Kelurahan diantaranya:

- a. Kelurahan Gaddong
- b. Kelurahan Wajo Baru
- c. Kelurahan Tompo Balang
- d. Kelurahan Malimongan Baru
- e. Kelurahan Timungan Lompoa

- f. Kelurahan Baraya
 - g. Kelurahan Bontoala
 - h. Kelurahan Bontoala Parang
 - i. Kelurahan Bontoala Tua
 - j. Kelurahan Bunga Ejaya
 - k. Kelurahan Layang
 - l. Kelurahan Parang Layang
3. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
- a. Visi Misi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

VISI :

"Terwujudnya Kesejahteraan Sosial dan Kemandirian bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Sulawesi Selatan tahun 2020"

MISI :

1. Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatkan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Melalui Kelembagaan
4. Memperkuat Nilai-Nilai Kebangsaan dan Rasa Nasionalisme

b. Tujuan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

1. Memberikan kesempatan dan peluang kepada PMKS untuk meningkatkan taraf hidup
2. Peningkatan pelayanan pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial
3. Peningkatan pelayanan penyebaran informasi Kesejahteraan sosial
4. Peningkatan kemampuan komunikasi, informasi, edukasi bagi PSKS.
5. Menumbuhkan semangat patriotisme melalui penanaman Nilai-Nilai Kepertinisan, Kepahlawanan, Kejuangan dan Kesetiakawanan sosial.

c. Sasaran Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

1. Berkontribusinya menurunkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan Pengembangan SDM dalam penyelenggaraan Kesos
3. Penyebaran informasi kesos berbasis website
4. Pengembangan kemampuan dalam mengoptimalkan kelembagaan dan pemanfaatan PSKS
5. Mengaktualisasikan Nilai-Nilai kesetiakawanan sosial sebagai suatu ketahanan sosial melalui pendekatan kearifan local

d. Tugas Pokok dan Rincian Tugas Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Pelayanan Lanjut Usia

Tugas Pokok :

- 1) Melakukan pembinaan rehabilitasi penyandang cacat dan pelayanan lanjut usia
- 2) Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar
- 3) Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan
- 4) Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6) Melakukan akreditasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan panji atau pusat pelayanan sosial penyandang cacat dan lanjut milik pemerintah dan swasta serta Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Lintas kabupaten/kota.
- 7) Memfasilitasi, memidiasi bimbingan dan pelayanan kegiatan penyandang cacat dan pelayanan lanjut usia.
- 8) Melakukan pembinaan usaha-usaha kelompok ekonomis produktif terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) penyandang cacat dan lanjut usia lintas kabupaten kota.

- 9) Menyusun konsep dan menyiapkan bahan penetapan pedoman pembinaan dan pelayanan penyandang cacat lintas kabupaten/kota.
- 10) Melakukan penyelenggaraan UPSK bagi penyandang cacat dan lanjut usia melalui mobil Unit Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Keliling (UPRSK) lintas kabupaten/kota.
- 11) Melakukan pembinaan teknis dan pelayanan melalui Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) lintas kabupaten/kota.
- 12) Melakukan bimbingan fisik, mental sosial dan keterampilan kerja lintas kabupaten/kota.
- 13) Memfasilitasi pemberian bahan pemukiman Eks Kusta, Panti Cacat Swasta dan Yayasan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) lintas kabupaten/kota.
- 14) Melakukan pembinaan teknis pengawasan terhadap eks penyakit kronis, dalam dan luar panti serta Lingkungan Pondok Sosial (LIPSOS).
- 15) Mengkoordinasi/ mengkonsultasikan Pelayanan Penyandang Cacat dan Lanjut Usia dalam dan luar panti.
- 16) Memberikan alat bantu orthopedi untuk penyandang cacat.
- 17) Melakukan pemberian bantuan usaha ekonomi produktif untuk penyandang cacat dan lanjut usia bagi yang telah memperoleh keterampilan.

18) Membentuk dan memfasilitasi Komisi Lanjut Usia Provinsi (KLP) dan Lembaga Sosial Lanjut Usia Provinsi, kabupaten/kota.

19) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Pelayanan Lanjut Usia dan memberikan sasaran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

20) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia Tunas Muda

Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

a. Visi Misi LKSLU Tunas Muda

Visi :

“ Menjadi lembaga yang peduli terhadap kesejahteraan sosial dan kemandirian anak, lanjut usia, fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya”

Misi :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya pengurus
2. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelayanan dan peyandang masalah kesejahteraan sosial.

3. Meningkatkan dan pemerataan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat PMKS
 4. Melaksanakan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang transparansi,partisipatif dan akuntabel
 5. Meningkatkan kemitraan serta memperkuat hubungan kelembagan masyarakat dan pemerintah.
- b. Tujuan LKSLU Tunas Muda
1. Semakin meningkatnya usia harapan hidup dan jumlah lanjut usia
 2. Lanjut usia dapat menikmati hari tuanya dengan aman, tenang dan sejahtera
 3. Terpenuhinya kebutuhan lanjut usia baik jasmani maupun rohani
 4. Terciptanya jaringan kerja pelayanan lanjut usia
 5. Terwujudnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepada lanjut usia

**B. Data Penerima Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Di Kota
Makassar**

Tabel 4

NO	NAMA	NIK	ID BDT	JK	TEMPAT TANGGAL LAHIR			
					TEMPAT	TANGGAL	BULAN	TAHUN
1	Rongrong Dg Kebo	7371105708310003	7371030007000259	P	Makassar	17	8	1951
2	Cawania Dg Nurung	7371104811460001	7371030007000553	P	Gowa	8	11	1946
3	Cakka Hayati	7371107006500003	7371030007000305	P	Ujung Pandang	30	6	1950
4	Saira Dg Tajo	7371107112450104	7371030007001064	P	Ujung Pandang	31	12	1945
5	Mantang	7371104508270005	7371030007000390	P	Ujung Pandang	5	8	1927
6	Dg. Ngintang	7371102610360001	7371030007000060	P	Ujung Pandang	20	10	1956
7	Saenab	7371105210470001	7371030007000581	P	Makassar	12	10	1947
8	Hatidja Dg Ngai	7371104112440003	7371030007000213	P	Ujung Pandang	1	12	1944
9	Kamariah Dg Kanang	7371104207380002	7371030007001003	P	Makassar	2	7	1958
10	Umming	7371104508560002	7371030009000119	P	Sinjai	5	8	1956
11	Ruga Dg Tommi	7371105709540001	7371030007000322	P	Ujung Pandang	17	9	1954
12	Maintang Dg Rombe	7371106512450004	7371030007000584	P	Takalar	25	12	1945
13	Le'le'ng Dg Rosi	7371105807350001	7371030007000643	P	Ujung Pandang	18	7	1935
14	Dg Dana	7371105508380002	7371030007000682	P	Ujung Pandang	15	8	1938
15	Ratiah Dg Ke'hang	7371106300550002	7371030007000218	P	Gowa	23	5	1950
16	Nursiah	7371105502560003	7371030007001794	P	Enrekang	15	2	1956
17	K Dg Jipa	7371104810500002	7371030007000483	P	Ujung Pandang	8	10	1950
18	Manisang Dg Te'ne	7371106406460004	73710300070001032	P	Bonto Nompo	24	6	1946
19	Dg Lebang	7371107112400030	7371030007001211	P	Takalar	31	12	1940
20	Dg Saga	7371105802490001	7371030007001215	P	Gowa	18	2	1949
21	Dg Bau	7371107112510007	7371030007000042	P	Ujung Pandang	31	12	1951
22	Te'ne Dg Tanning	7371105203460001	7371030007000997	P	Gowa	12	3	1946

23	Dg Bollo	7371107112560045	7371030009000162	P	Jenepono	31	12	1956
24	Sitti Dg Bau	7371105012420001	7371030009001222	P	Maros	10	12	1942
25	Puji	7371106012500001	7371030009000075	P	Ujung Pandang	20	12	1950
26	Sitti Sairah	7371105112480001	7371030007000551	P	Ujung Pandang	15	12	1949
27	Dg Rannu	7371105010500009	7371030009000715	P	Makassar	23	6	1954
28	Musiati	7371106005540001	7371030007000373	P	Ujung Pandang	20	5	1954
29	Dg Lu'mu	7371104511530006	7371030007000373	P	Takalar	5	11	1953
30	Dg Isa	7371104502460001	7371030007000440	P	Bone	5	2	1946
31	Nurhayati Dg Caya	7371104511480001	7371030007001218	P	Ujung Pandang	5	11	1948
32	Tanawali Dg Nurung	7371106107500001	7371030002000336	P	Ujung Pandang	21	7	1950
33	S Dg Rampu	7371107112550105	7371030002000393	P	Ujung Pandang	31	12	1955
34	Dg Lenteng	7371106107460001	7371030002000470	P	Ujung Pandang	21	7	1946
35	Sadiyah	7371107112520114	7371030003001505	P	Ujung Pandang	31	12	1952
36	R.Dg Kanah	7371106911500004	7371030007000304	P	Takalar	19	12	1950
37	Sinar Dg Jintu	7371104505500009	7371030007000493	P	Takalar	15	5	1950
38	B Dg Kontu	7371104511450001	7371030002000756	P	Ujung Pandang	5	11	1945
39	Dg Tanang	7371107112450112	7371030002000315	P	Ujung Pandang	31	12	1945
40	Tanawali Dg Nurung	7371106107500001	7371030002000336	P	Ujung Pandang	21	7	1950
41	Kamaria Dg Sanga	7371104507530001	7371030007000131	P	Makassar	5	7	1953
42	Indari	7371104304560004	7371030007000327	P	Ngahjuk	3	4	1956
43	Sating	7371107112410020	7371030007000479	P	Takalar	31	12	1941
44	Sitti Hartati	7371107112550152	7371030009002123	P	Makassar	31	12	1955
45	Norma Dg Rimang	7371034701570001	7371040006000087	P	Makassar	7	1	1957
46	Hadrah	7371090512570002	7371100011000375	P	Makassar	5	12	1957
47	Sarpiah Dg Sugi	7371027112550040	73710020007000277	P	Makassar	31	12	1955
48	Sitti Hermida	7371014612180001	7371010009000054	P	Makassar	6	12	1948
49	Hamma	7371074708560005	7371090007000499	P	Makassar	7	8	1956
50	Dg Kebo	7371037112550001	7371040002000085	P	Makassar	31	12	1955

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa sebanyak 50 orang penerima program Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Penerima program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam hal ini lanjut usia (lansia) yang berusia 60 tahun ke atas dan masih potensial untuk bisa produktif dalam hal mengembangkan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar.

C. *Public Private Partnership* Dalam Pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Di Kota Makassar.

Pada penelitian ini *Public Private Partnership* dalam Pemberdayaan Lanjut Usia (lansia) melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar dapat dilihat dari indikator *Public Private Partnership* yaitu: Model Kemitraan Mutualistik, Faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun hasil dari penelitian terkait dengan *Public Private Partnership* dalam Pemberdayaan Lanjut Usia (lansia) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Di Kota Makassar sebagai berikut.

Dari ke tiga Model Kemitraan yang di kemukakan (Sulistiyani 2004) Model Kemitraan Mutualistik merupakan model kemitraan yang cocok dari hasil penelitian yaitu Model kemitraan mutualistic merupakan persekutuan antara Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda yang sama-sama menyadari aspek penting nya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat sehingga akan dapat mencapai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat lanjut usia (lansia).

Kerjasama antara pemerintah dengan swasta dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan sebagai partner kerjasama yang mendanai dan membangun fasilitas bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar kemudian Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda yang menjalankan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) : Mekanisme kerjanya ialah Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda memberikan daftar nama-nama lanjut usia dalam bentuk proposal kemudian diajukan ke Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan . Jika proposal tersebut di sepakati oleh pihak Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan maka bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dapat disalurkan ke penerima program dalam hal ini lanjut usia sebagai penerima bantuan yang sebelumnya terdaftar dalam proposal pengajuan bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Sosial Lansia menyatakan sebagai berikut :

“ Kerja sama kita itu tadi sesuai dengan mekanisme dengan cara pihak dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) membawa data-data nama lanjut usia (lansia) nya yang akan dapat program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam bentuk proposal kemudian kita memberikan pemahaman-pemahaman, kita memberikan surat rekomendasi umpamanya dalam bentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial pelayanan lanjut usia seperti tahun-tahun kemarin. Kita memberikan surat rekomendasi dan pemahaman tujuan program itu kemudian Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) juga bertanggung jawab sesuai apa yang di laksanakan nya seperti pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) membuat laporan pertanggung

jawaban atas bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) ini” .(Hasil wawancara MB pada tanggal 5 Oktober 2020) .

Dari hasil wawancara di atas oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Sosial Lansia dapat kita ketahui bahwa kerja sama antara pemerintah dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda dengan cara pemerintah memberikan surat rekomendasi dan pemahaman-pemahaman tentang program Usaha Ekonomi Produktif agar program tersebut bisa berjalan dengan baik dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda bertanggung jawab sesuai pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda yang menyatakan bahwa :

“ Iya sesuai dari pernyataan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Kita dari Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda tinggal menjalankan arahan dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang telah di buat oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan kemudian menyalurkan bantuan kepada lanjut usia sesuai prosedur dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dan membuat laporan pertanggung jawaban” . (Hasil wawancara AI pada tanggal 9 Oktober 2020) .

Dari pernyataan Ketua Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda dapat kita ketahui bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda bertanggung jawab untuk menjalankan dan menyalurkan bantuan kepada lanjut usia sesuai dengan prosedur yang di berikan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan . Dari pendamping lansia pun menyatakan sebagai berikut :

“ Saya selaku pendamping dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda yang turun langsung kerumah lanjut usia untuk ambil Nomor Induk Kependudukan (NIK) , ID BDT (Basis Data Terpadu) , Kartu Keluarga (KK) nya untuk di input nanti nama nya di proposal” . (Hasil wawancara MG pada tanggal 9 Oktober 2020) .

Berdasarkan wawancara dengan pihak informan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendamping dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda yang datang kerumah lanjut usia untuk mendata nama-nama lanjut usia (lansia) yang menerima bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) . Dari lansia pun menyatakan sebagai berikut :

“Awal nya itu kita disuruh kumpul Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK) , ID BDT (Basis Data Terpadu), Kartu Keluarga (KK) terus selanjutnya dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda yang serahkan ki ke Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan . Kita dari lansia tinggal menungguki saja bantuan, jadi kita tidak repot meki mengurus sana sini karena kita orang tua tidak mengerti masalah begitu nak . Dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda adaji pendamping yang turun langsung” . (Hasil Wawancara CK pada tanggal 12 Oktober 2020) .

Sesuai hasil wawancara di atas yang di kemukakan oleh lanjut usia penerima program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bahwa Proses penerimaan bantuan program tersebut dengan cara lansia mengumpulkan Kartu Tanda Kependudukan (KTP) , Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK) ID BDT (Basis Data Terpadu) ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Tunas Muda . Selanjutnya dari pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda yang berkordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan untuk

menyerahkan langsung bantuannya ke lanjut usia yang menerima program Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Adapun strategi dan tahapan yang dilakukan dalam pencapaian tujuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) , dapat di ketahui sesuai hasil wawancara sebagai berikut:

“ Strategi kita itu mengumpulkan data-data lanjut usia yang dimana apakah itu melalui Lembaga kesejahteraan Sosial lanjut usia yah lewat Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKLSU) kemudian pencapaian nya itu lansia itu kita berikan bantuan agar supaya hidup lebih tidak bergantung dengan orang lain atau keluarganya begitu artinya bisa hidup mandiri” . (Hasil wawancara MB pada tanggal 5 Oktober 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitas Sosial Lansia maka dapat diketahui bahwa strategi dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data lanjut usia melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) dan Pencapaian tujuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar agar lanjut usia (lansia) bisa sejahtera dan hidup mandiri tanpa bergantung dengan orang lain. Dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda menyatakan bahwa :

“ Strategi kita memang dengan cara mencari lanjut usia yang betul-betul bisa di berdayakan kemudian kita mendata lanjut usia tersebut, Pencapaian kita sejauh ini Alhamdulillah lanjut usia bisa hidup berkembang dan mandiri tanpa merepotkan keluarga nya” .

(Hasil wawancara AI pada tanggal 9 Oktober 2020) .

Sesuai hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan oleh Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda strategi dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKLSU) Tunas Muda yaitu dengan cara mendata lanjut usia . Pencapaian bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) lanjut usia dapat hidup berkembang dan mandiri. Dari penerima program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) mengatakan bahwa :

“ Semenjak ada ini bantuan yang berikan bisama mulai usaha jual-jualan dan adami kuterima uang setiap harinya jadi itu anak ku kasian tidak repot mi lagi na kasikan uangnya, malahan kalau ada lebih nya ini hasil jualanku kukasi ji uang jajan cucuku” . (Hasil wawancara SN pada tanggal 12 Oktober 2020) .

Sesuai hasil wawancara dari informan penerima bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar dapat di simpulkan bahwa sejak penerima bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) lanjut usia merasa kehidupan mereka lebih sejahtera. Adapun proses untuk mendapatkan bantuan dari program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dapat di ketahui pada hasil wawancara berikut

“Keterlibatan pemerintah itu dengan cara memberikan bantuan kepada lanjut usia (lansia) melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda sesuai dengan mekanisme, yang dimana mekanismenya itu harus ada proposal dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda . dalam proposal itu sendiri harus ada Nomor Induk Kependudukan (NIK) , Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) , ID BDT (Basis Data Terpadu) dan surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota dimana wilayah Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) nya berada” . (Hasil wawancara MB pada tanggal 5 Oktober 2020) .

Berdasarkan hasil wawancara di atas oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Sosial Lansia dapat kita ketahui bahwa keterlibatan pemerintah dalam memberdayakan lanjut usia dengan cara memberikan bantuan kepada lanjut usia (lansia) melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda tetapi harus melalui mekanisme yang dianjurkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan .

“ Kalau kita mau menerima program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) itu memang harus ada mekanismenya kita ikuti saja alurnya dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan . Pertama saya cari dulu lansia yang betul-betul tidak mampu dan yang masih biasa produktif dengan kata lain masih bisa bekerja itupun kan kerjanya usaha jual-jualan lalu kita datumi lanjut usianya terus kita buat proposal dan di ajukan di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dan kalau sudah di ACC mi dari pihak Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan nanti kita bisa menunggu bantuannya keluar” .

(Hasil wawancara AI pada tanggal 9 Oktober 2020) .

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerimaan bantuan Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar harus mengikuti mekanisme dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yaitu dengan cara membuat Proposal terlebih dahulu kemudian menyerahkan proposal ke Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan .

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan memberikan tanggung jawab kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda untuk melihat perkembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) . Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitas Sosial Lansia yang menyatakan bahwa:

“ Kita dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan langsung mengsosialisasikan kepada pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda dan lansia. Apabila bantuan sudah ada kita dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda turun langsung memberikan bantuan kepada penerima bantuan yaitu lanjut usia (lansia) . Setelah itu kita serahkan ke Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSLU) Tunas Muda untuk mengontrol perkembangan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang dijalankan langsung oleh lansia. (Hasil wawancara MB pada tanggal 5 Oktober 2020)

Sesuai hasil wawancara yang di kemukakan di atas oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitas Sosial Lansia yang mengatakan bahwa untuk program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar ini di serahkan langsung ke lanjut usia (lansia) Hal ini sesuai dengan pernyataan Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda sebagai berikut :

“ Kita dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda terus memantau dan mengontrol perkembangan program ini apakah berjalan dengan baik dan menanyakan terkait kendala yang dialami oleh lanjut usia sebagai penerima bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP)” . (Hasil wawancara AI pada tanggal 9 Oktober 2020) .

Dari hasil wawancara di atas dari Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda yang mengatakan bahwa dari pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas muda terus memantau perkembangan dan kendala yang di rasakan oleh lanjut usia sebagai penerima bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) . Dari penerima bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) mengatakan hal yang sama sebagai berikut :

“ Setiap minggu itu datang dari LKSLU, untuk melihat perkembangan jualan ta . Biasanya begitu ji terus na kasi ki arahan supaya lancar terus ini jualan ku . Kalau dari Dinas itu pi nah datang 1 kaliji pas bawa bantuan Tapi sebenarnya kalau bisa untuk program selanjutnya mending di tangkanmi karna kalau kita yang beli sendiri di tauki kebutuhanta ituj harapan ku nak” . (Hasil wawancara SN pada tanggal 12 Oktober 2020) .

Berdasarkan dari hasil pernyataan di atas yang di kemukakan oleh lanjut usia (lansia) penerima program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bahwa dari pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda melakukan kunjungan setiap minggu untuk melihat perkembangan dan memberikan arahan agar program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar berjalan dengan lancar .

Dari hasil observasi/pengamatan peneliti di lapangan dapat disimpulkan bahwa Kerja sama antara Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda yaitu Dinas Sosial Provinsi sebagai partner kerja sama yang mendanai dan membangun fasilitas bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar kemudian Lembaga Kesejahteraan

Sosial Lanjut Usia (LKLSU) Tunas Muda yang mengoperasikan/menjalankan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) . Mekanisme kerjanya adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda memberikan daftar nama-nama lanjut usia (lansia) dalam bentuk proposal kemudian di ajukan ke Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan , jika proposal tersebut di sepakati oleh pihak Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan maka bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar dapat di salurkan ke penerima program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar dalam hal ini lanjut usia (lansia) . Setelah bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) telah tersalurkan ke lanjut usia (lansia) maka dari pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda melakukan kunjungan setiap minggu untuk memantau perkembangan, kendala yang dirasakan oleh lanjut usia sebagai penerima bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) , dan memberikan arahan agar program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar berjalan dengan lancar kemudian Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda membuat Laporan Pertanggung Jawaban dan di serahkan ke Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Public Private Partnership dalam Pemberdayaan Lanjut Usia (lansia) melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Di Kota Makassar.

Berikut Faktor Pendukung dan Penghambat Public Private Partnership dalam Pemberdayaan Lanjut Usia (lansia) melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Di Kota Makassar yaitu :

1) Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah faktor-faktor yang bersifat mendorong, mengajak, dan membantu membuat suatu hal yang kita kerjakan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi rencana dan keinginan kita sebelumnya. Berikut hal-hal yang menjadi faktor pendukung yang mempengaruhi *Public Private Partnership* dalam pemberdayaan lanjut usia (lansia) melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar yaitu:

a. Partisipasi masyarakat dalam perkembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan program usaha ekonomi produktif oleh lanjut usia . Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh pendamping Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda dan lanjut usia sebagai penerima program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) , yang mengatakan bahwa :

“ Iya, kita itu mempunyai yang nama nya pendamping lanjut usia . yang dimana kita terapkan itu 1 banding 5 maksudnya itu 1 pendamping dengan 5 lanjut usia fungsinya itu untuk lebih fokus setiap minggu nya berkunjung ke rumah lanjut usia melihat perkembangan usaha nya tersebut” . (Hasil wawancara AI pada tanggal 9 Oktober 2020) .

Dari hasil wawancara di atas oleh Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda bahwa setiap lanjut usia memiliki pendamping dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda untuk mempermudah melihat perkembangan bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) . Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh pendamping Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda yang menyatakan bahwa :

“ Salah satu peranan ta kita sebagai pendamping lansia, yah kita cuma dampingi lansia supaya tetap semangat menjual dan berikan motivasi terus agar berjalan dengan baik ini program Usaha Ekonomi Produktif (UEP)” . (Hasil wawancara MG pada tanggal 9 Oktober 2020)

Dari hasil wawancara di atas dari pendamping Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LSKLU) Tunas Muda memberikan motivasi ke lanjut usia sebagai penerima program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) agar bisa berjalan dengan baik. Dari keluarga penerima bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) menyatakan bahwa :

“ Setiap mengeluhki itu karna kurang pembeli nya, selalu ka kasi semangatki lagi menjual. Bilangka mungkin besok pi lagi ada rejeki ta ma karna rejeki itu tidak kemanaji jadi cukup

bersabarki saja dan selaluki bersyukur” . (Hasil wawancara DS pada tanggal 12 Oktober 2020) .

Dari hasil wawancara di atas dari Keluarga penerima program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Partisipasi dari keluarga memang sangat di butuhkan untuk memberikan semangat yang tinggi untuk keberlangsungan perkembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Di Kota Makassar . Dari penerima bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) menyatakan bahwa :

“Iye nak karna memang kusuka saya menjual-jual begini, jadi enak mi kurasa daripada tinggal ji saja dirumah tidur tambah sakitja nanti, lebih baik menjualka tambah-tambah lagi uangku nak” (Hasil wawancara SN pada tanggal 12 Oktober 2020) .

Dari hasil wawancara informan mengatakan bahwa sejak pelaksanaan program Usaha Ekonomi Produktif berjalan, lanjut usia merasa lebih bersemangat berjualan dengan adanya bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk menambah perekonomian lanjut usia.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa Pelaksanaan bantuan program Usaha Ekonomi Produktif oleh lanjut usia dapat berjalan dengan baik, atas dasar semangat dan kemauan lanjut usia untuk mengikuti program ini dengan baik. Selain itu pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik dan lancar dikarenakan ada keterlibatan aktif dari anggota keluarga serta pendamping Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU)

Tunas Muda yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk keberhasilan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Dari hasil observasi/pengamatan peneliti di lapangan dilihat bahwa faktor pendukung bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yaitu dari partisipasi masyarakat dengan adanya keterlibatan aktif dari anggota keluarga dan pendamping Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKLSU) Tunas Muda.

2) Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah suatu hal yang menghambat atau menghentikan suatu hal yang sudah dijalankan sebelumnya. Begitupun dengan Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang dijalankan tetapi masih saja ada hal-hal yang membuat program ini menjadi kurang efektif dan kurang maksimal. Berikut beberapa faktor penghambat *Public Private Partnership* dalam pemberdayaan lanjut usia (lansia) melalui usaha ekonomi produktif (UEP) di Kota Makassar yaitu :

a. Data ID BDT (Basis Data Terpadu) yang tidak Valid

Data ID BDT (Basis Data Terpadu) merupakan sistem data elektronik yang memuat informasi sosial ekonomi rumah tangga berikut individu dengan tingkat kesejahteraan terendah yang digunakan dalam penetapan sasaran program. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitas

sosial lansia dan Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda yang mengatakan bahwa :

“ Hambatan nya sekira saya itu yah banyak lansia data nya yang tidak valid, karna kan kalau kita kasi program ini harus ada NIK nya dan BDT (basis data terpadu) yang terdaftar untuk kita input nanti nama-nama nya kalau tidak ada ID BDT nya itu kita suruh cari lagi lanjut usia yang betul-betul bisa di berdayakan dan memiliki ID BDT ” . (Hasil wawancara MB pada tanggal 5 Oktober 2020)

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitas Sosial Lansia bahwa hambatan yang di rasakan yaitu dengan adanya data yang tidak valid seperti banyak lanjut usia yang tidak memiliki ID BDT (basis data terpadu) atau banyak yang belum terdaftar . Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda yang menyatakan bahwa :

“Iya memang ada beberapa lanjut usia yang belum terdaftar ID BDT (basis data terpadu) nya, maka nya itu kita daftarkan nama yang dapat program itu yang ada saja ID BDT (basis data terpadu) sesuai mekanisme yang berikan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan ” . (Hasil wawancara AI pada tanggal 9 Oktober 2020) .

Dari hasil wawancara di atas oleh Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda bahwa masih banyak lanjut usia yang belum memiliki ID BDT (basis data terpadu) sehingga tidak bisa di daftarkan untuk mendapat bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Hal ini sesuai dengan pernyataan

lanjut usia sebagai penerima bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar yang menyatakan bahwa :

“ Iye nak, dari pendamping itu juga minta ID BDT (basis data terpadu) katanya itu persyaratan ta untuk dapat ini bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP)” .
(Hasil wawancara CH pada tanggal 12 Oktober 2020) .

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa data yang tidak valid menjadi faktor penghambat pelaksanaan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar karna masih banyak nya lanjut usia yang ID BDT (basis data terpadu) belum terdaftar . ID BDT (basis data terpadu) merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar .

Dari hasil observasi/pengamatan peneliti di lapangan di lihat bahwa faktor penghambat pelaksanaan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar yaitu data yang tidak valid seperti ID BDT (basis data terpadu) yang belum terdaftar .

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Model kemitraan mutualistik merupakan kerja sama antara Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda yaitu Dinas Sosial Provinsi sebagai partner kerja sama yang mendanai dan membangun fasilitas bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar kemudian Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda yang mengoperasikan/menjalankan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Mekanisme kerjanya adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda memberikan daftar nama-nama lanjut usia (lansia) dalam bentuk proposal kemudian di ajukan ke Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, jika proposal tersebut di sepakati oleh pihak Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan maka bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar dapat di salurkan ke penerima program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar dalam hal ini lanjut usia (lansia).

Setelah bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) telah tersalurkan ke lanjut usia (lansia) maka dari pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda melakukan kunjungan setiap minggu untuk memantau perkembangan, kendala yang dirasakan oleh lanjut usia sebagai penerima bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan memberikan arahan agar program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar berjalan

dengan lancar kemudian Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda membuat Laporan Pertanggung Jawaban dan di serahkan ke Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

Faktor pendukung model kemitraan mutualistik yaitu karena adanya keterlibatan aktif dari anggota keluarga serta pendamping Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk keberhasilan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Faktor penghambat model kemitraan mutualistik yaitu karna adanya data yang tidak valid . Masih banyak lanjut usia yang ID BDT (basis data terpadu) belum terdaftar . sedangkan ID BDT (basis data terpadu) merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah dan pihak yang terlibat dalam pemberdayaan lanjut usia (lansia) harus lebih giat lagi melakukan Pendekatan sosial untuk meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar
2. Diharapkan Pemerintah Kota Makassar harusnya memberikan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sesuai dengan kemampuan lanjut usia seperti membuat kerajinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2008). *Intervensi Komunitas pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Adam, Amzal (2020) *Pengaruh Pola Kemitraan Dalam Meningkatkan Volume Pengunjung Bugis Waterpark Adventure Kota Makassar*
- Ambar, Teguh Sulistiyani. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media
- Aritonang, E. (2001). *Pendampingan Komunitas Pedesaan*. Bogor: Bina desa.
- Aslamiyah, S., Haryono, B. S., Rozikin, M., Publik, J. A., Administrasi, F. I., & Brawijaya, U. (2008). *Model Partnership Sebagai Upaya Strategis Peningkatan Pelayanan Air Bersih (Studi terhadap Public Private Partnership di Perusahaan Daerah Air Mimim Kabupaten Gresik)*. 2(1), 89-94.
- Aziz, M. (2012). *Dasar-dasar pengembangan masyarakat*. Yogyakarta: Samudera biru.
- Hasanah, B., Annisarizki, A., & Surahman, S. (2019). Pemberdayaan Dan Pendampingan Pengembangan Desa Wisata Sukaratu Kabupaten Serang Berbasis Public Private Partnership. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 2, 580-590.
- Ismowati, M. (2016). *Kajian Urgensi Public Private Partnerships Di Kota Bandung*. VIII (September).
- Kartasasmitha, G. (1996). *Pembangunan untuk rakyat memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Kedungsepur, W. (2016). *Public-Private Partnership untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor*. 5(4), 410-425.
- Mariane, I., Suryadi, S., Firdausijah, T., & Ilhami, R. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Public Private Partnership Bagi Peningkatan Pariwisata Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. *KAI BON ABHINAYA: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 2(2), 71-76.
- Nurmaeta, S. (n.d.). *Kemitraan Pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pengelolaan Rumah Hati Rumah Bakat di Kota Makassar*. 5.
- Patria, A. S., & Mutmainah, S. (2018). *Model Pemberdayaan Kelompok Lanjut Usia Wanita Melalui Industri Kreatif*. 9(1), 15-27.

- Pemerintahan, J. I., & Diponegoro, U. (2013). *Public Private Partnership (Studi Kasus Penataan Shelter PKL Simpang Lima Kota Semarang)*. 1–9.
- Putra, A. S. (2013). *Pola Kemitraan Pariwisata Dalam Manajemen Atraksi Desa Wisata Pampang Kota Samarinda*. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 5(3), 189-200.
- Pratiwi, N. G. (n.d.). *Analisis Public-Private Partnership Dalam Pengembangan Objek Wisata Telaga Sarangan Di Kabupaten Magetan*.
- Rohmaniyanti, R. (2016). *Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (Uep) Di Lembaga Sosial Hafara, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Sleman, K. (2017). *Pemberdayaan Lansia Melalui Usaha Ekonomi Produktif oleh Bina Keluarga Lansia (BKL) Mugi Waras di Kabupaten Sleman*. 1(1), 177–192. <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.011-10>
- Sosial, F. I., Politik, I., Muhammadiyah, U., Jl, M., & No, S. A. (n.d.). *Kemitraan dalam pelayanan publik, sebuah penjelajahan teoritik*. (259), 91–101.
- sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. bandung: alfabeta.
- sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. bandung: alfabeta.
- Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: refika aditama.
- Zubaedi. (2007). *Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.

Sumber lain

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 38 ayat 1
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 Pasal 6 Ayat 1

L

A

M

N

➤ Dokumentasi

(Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan)

(Kantor Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Tunas Muda)

(Struktur Organisasi Lembaga Kesejahteraan Tunas Muda)

➤ Wawancara dengan Instansi

(Bapak Muhammad Bakri , S.Sos, MM , 5 Oktober 2020, di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan) .

- Wawancara dengan lanjut usia (lansia) sebagai penerima program Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

(Ibu Saenab, 12 Oktober 2020, di Warung penerima program)

(Ibu Cakka Hayati, 12 Oktober 2020, di Warung penerima program)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

nomor : 1410/05/C.4-VIII/IX/42/2020

22 Muharram 1442 H

lap : 1 (satu) Rangkap Proposal

10 September 2020 M

: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 933/FSP/A.1-VIII/IX/42/2020 tanggal 7 September 2020, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **SRI WAHYUNI**
No. Stambuk : **10564 1112816**
Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**
Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Public Private Partnership dalam Pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia) melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 19 September 2020 s/d 19 Nopember 2020.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716

nomor : 1410/05/C.4-VIII/IX/42/2020
jumlah : 1 (satu) Rangkap Proposal
jenis : Permohonan Izin Penelitian

22 Muharram 1442 H
10 September 2020 M

Kepada Yth.

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel

di –

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 933/FSP/A.1-VIII/IX/42/2020 tanggal 7 September 2020, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SRI WAHYUNI
No. Stambuk : 10564-1112816
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Public Private Partnership dalam Pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia) melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 19 September 2020 s/d 19 Nopember 2020.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716

1 2 0 2 0 1 9 3 0 0 6 5 0 2

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 6067/S.01/PTSP/2020
 Sampiran :
 Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
 1. Walikota Makassar
 2. Kepala Dinas Sosial Prov. Sulsel

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1410/05/C.4-VIII/IX/42/2020 tanggal 10 September 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **SRI WAHYUNI**
 Nomor Pokok : 105641112816
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar

dimaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

"PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP DALAM PEMBERDAYAAN LANJUT USIA (LANSIA) MELALUI USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) DI KOTA MAKASSAR"

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **19 September s/d 19 November 2020**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**,

demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 14 September 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
 Pangkat : Pembina Tk.I
 Nip : 19710501 199803 1 004

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 NOMOR : 0156/FSP/A.3-VIII/II/42/2021**

**Tentang
 PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI PADA UJIAN TUTUP
 DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Makassar setelah
MENIMBANG : Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan ujian seminar tutup mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan dipandang perlu untuk mengangkat dosen penguji

MENGINGAT : 1. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah
 2. Statuta dan Anggaran Rumah Tangga Universitas Makassar

MEMPERHATIKAN : Pengangkatan dosen penguji pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- Pertama** : Mengangkat dosen sebagai penguji ujian seminar tutup pada sebagaimana yang terlampir pada surat keputusan ini.
 - Kedua** : Segala sesuatu yang berkenaan dengan Surat Keputusan ini diatur oleh Pimpinan Fakultas.
 - Ketiga** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah selesai ujian seminar tutup Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
 - Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka Insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jawabumillahika Khaerun Katsiran

Ditetapkan di : Makassar
 Tanggal : 20 Februari 2021 M

W. L. H. H.
 Dekan
 Universitas Muhammadiyah Makassar
 (Tanda Tangan dan Stempel Resmi)

- Tembusan :**
1. Dosen yang bersangkutan.
 2. Arsip.

Universitas Muhammadiyah Makassar
 Kampus 1, Polakawene, Denpasar Barat

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Faculty of Social and Political Sciences

Menyayidhi Lanting - Jalan Sultan Iskandar No. 210 Makassar 91227
 Telp: (0411) 866.9724 ext: (0411) 866.9700
 E-Mail: fasil@uimuhmah.ac.id
 E-Mail: fasil@uimuhmah.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 NOMOR : 0150/FSP/A.3-VIII/II/42/2021**

**Tentang
 PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI PADA SEMINAR UJIAN HASIL SKRIPSI
 DILINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar, setelah
MENIMBANG Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan ujian seminar ujian hasil skripsi mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan dipandang perlu untuk mengangkat dosen penguji.

MENGINGAT 1. Surat Keputusan Tinggi Muhammadiyah
 2. Mula dan Anggaran Rumah Tangga Unismuh Makassar

MEMPERHATIKAN Pengusutan dosen penguji pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** Pertama Mengangkat dosen sebagai penguji seminar ujian hasil skripsi pada sebagaimana yang terlampir pada surat keputusan ini
- Kedua** Segala sesuatu yang berkenaan dengan Surat Keputusan ini diatur oleh Pimpinan Fakultas
- Ketiga** Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah selesai ujian seminar hasil skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
- Keempat** Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka Insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jazakumulahu Khaseran Katsiran

Ditetapkan di Makassar
 Tanggal 11 Februari 2021

Dekan

(Signature)
 Dr. H. W. M. Malik, S.Sos, M.Si
 NIP. 195717

- Tembusan :**
1. Dosen yang bersangkutan.
 2. Arsip

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Al-Iqra Lt.5) Makassar 90221
Telp. (0411) – 866972, Faks. (0411) – 865588

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Pimpinan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Sri Wahyuni
Prodi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	5%	15 %
2	Bab 2	11%	25 %
3	Bab 3	7%	15 %
4	Bab 4	2%	10 %
5	Bab 5	0%	5 %

Dinyatakan telah **Lulus** cek plagiat yang diadakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar 3 Februari 2021

Pemeriksa

Nursaleh Hartaman, S.IP.,M.IP
NBM. 137 4895

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si
NBM. 103 1102

RIWAYAT HIDUP

SRI WAHYUNI, lahir pada tanggal 16 Maret 1998 di Jl. Bontoduri 5 Setapak 1 No 22A tepatnya di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, anak Pertama dari Tujuh bersaudara (Anak Sulung) yang merupakan buah cinta dari pasangan Ahmad Sijaya dan Darmawati. Penulis memulai jenjang

pendidikan formal dari Madrasah Ibtidayah (MI) Al- Abrar Kota Makassar pada tahun 2003 dan lulus pada tahun 2011. Ditahun yang sama, penulis melanjutkan di SMP YP-PGRI 4 Makassar Kota Makassar dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang sama pula, penulis melanjutkan pendidikannya di SMKN 7 Makassar dan tamat pada tahun 2016. Penulis pernah mengikuti organisasi Palang Merah Remaja (PMR) dan OSIS. Setelah tamat SMK, penulis langsung melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi melalui penerimaan mahasiswa jalur mandiri dan terdaftar sebagai mahasiswa program studi strata satu Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pernah mengikuti Darul Arkan Dasar (DAD) Muhammadiyah. Pada tahun 2021 penulis mendapatkan gelar S.1 Jurusan Ilmu Pemerintahan dengan judul Public Private Partnership dalam Pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia) melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar. Semoga dengan hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca dan penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan dari Universitas Muhammadiyah Makassar di masyarakat.